

# Dirut PLN Soal Polemik Inefisiensi Rp37 Triliun Gas Habis Pakai BBM



Nur Pamudji

## Pamudji: Audit itu Permintaan DPR

Bogor. Apriori sejumlah kalangan DPR terutama Komisi VII terhadap figur Menteri BUMN Dahlan Iskan yang berani melawan arus kekuasaan 'politik Senayan' kian memanas. Dicari-carilah sasaran tembak kesalahan mantan Dirut PLN itu. Bagaimana sebenarnya masalah inefisiensi Rp37 triliun?

Direktur Utama PLN Nur Pamudji menegaskan, audit BPK di PLN

■ Halaman 7

RAKYAT KALBAR

Kamis, 1 November 2012

## Gas Habis

tahun 2010 lalu yang kini menjadi polemik hanya berkaitan dengan delapan pembangkit listrik, bukan soal pengadaan genset maupun lainnya.

Audit BPK yang menemukan inefisiensi sebesar Rp37 triliun itu dianggap DPR merugikan negara. "Soal Rp37 triliun, itu hasil audit BPK atas permintaan DPR tahun 2010, atas permintaan DPR terhadap delapan pembangkit yang ada di Indonesia, sebagian besarnya berada di Pulau Jawa," kata Nur Pamudji dalam media workshop soal rasionalisasi tarif listrik menuju subsidi tepat sasaran, di Sentul, Bogor, Selasa malam (30/10).

Ketika itu BPK membentuk panitia kerja hulu listrik. Panitia ingin mendapatkan gambaran listrik tentang biaya energy primer. Singkat cerita, audit itu selesai September 2011 dan diserahkan ke DPR.

"Jadi sudah lebih setahun ya. PLN memang belum pernah diundang untuk membahas hasil audit itu. Baru seminggu lalu diundang ke DPR, tapi tidak dilanjutkan karena Pak Dahlan tidak datang. Jadi yang mau dihadirkan itu ternyata Pak Dahlan, bukan Dirut PLN," kata Nur Pamudji.

Baru-baru ini PLN baru mendapatkan hasil audit sebagai pihak yang diaudit oleh BPK tersebut. Intinya, temuan inefisiensi Rp37 triliun itu adalah biaya yang bisa dihemat seandainya 8 pembangkit di Indonesia bisa mendapatkan gas. Delapan pembangkit ini sendiri operasionalnya bisa menggunakan gas maupun BBM.

Dijelaskan Nur Pamudji, sebenarnya hal ini sudah pernah dijelaskan PLN kepada Komisi

VII DPR, seperti pembangkit Gresik, Belawan, Muara Karang dan lainnya. Pada awalnya semuanya seratus persen dioperasikan pakai gas, setelah sekian tahun beroperasi pasokan gas menyusut dan akhirnya habis.

"Kalau bahan bakar gas surut, padahal pembangkit listrik harus tetap beroperasi, solusinya apa? Ya kita pakai BBM. Artinya, dicampur bahan bakarnya sebagian pakai gas sebagian BBM, supaya output dari pembangkit listriknya tidak berkurang, itu saja," ungkap Nur Pamudji.

Ada delapan pembangkit yang seharusnya bisa pakai gas, karena gas tidak ada terpaksa pakai BBM. Akibatnya, kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan. Kalimatnya BPK begitu. Jadi kalimatnya auditor itu tajam dan sangat menggambarkan persoalannya," tandas Dirut PLN itu.

Belakangan Nur Pamudji heran, karena ada pihak yang mengkaitkan hasil audit BPK soal inefisiensi senilai Rp37 triliun itu dengan pengadaan genset. "Apa hubungannya dikaitkan dengan genset, laporan BPK tidak ada membahas genset. Jadi ini menurut saya itu misinformasi," tegasnya lagi.

Dalam workshop itu Nur Pamudji juga menyampaikan sedikit bocoran tentang laporan BPK mengenai delapan pembangkit tersebut. Delapan pembangkit itu di antaranya pembangkit Tambak Lorok yang menggunakan gas dari lapangan Kepodang. Kemudian pembangkit Muara Tawar.

"Audit itu direkomendasikan BPK ke BP Migas dan PGN (Perusahaan Gas Negara), justru PLN tidak diminta me-

nindaklanjuti. Pembangkit di Belawan, Medan juga direkomendasikan BPK ke BP Migas, tindak lanjutnya pemerintah memutuskan mengubah fasilitas di sana," jelas Nur Pamudji.

Begitupun dengan pembangkit di Muara Karang dan Priok yang dijadikan satu dalam audit BPK, juga tidak direkomendasikan BPK ke PLN, tapi kepada PT Nusantara Rekas selaku kontraktor dan Menteri ESDM. Namun karena perusahaan itu rekanan PLN, maka rekomendasi BPK dikerjakan bersama-sama.

Pembangkit di Gresik rekomendasikan BPK juga ke BP Migas. Tindak lanjutnya sudah dilakukan penambahan pasokan gas untuk pembangkit itu. Audit di pembangkit Grati rekomendasinya juga ke BP Migas yang memiliki otoritas mengatur masalah gas dan realisasinya juga ada tambahan gas di sana.

"Pembangkit Teluk Lempu di Pekanbaru, rekam BPK juga ke BP Migas. Nah, tidak adanya ditambah pasokan dari sumur yang baru dikembangkan oleh Energy Mega Persada (EMB). Hanya untuk pembangkit di Bali, PLN dapat rekam BPK. Rekom juga untuk PGN, tindak lanjutnya direksi PLN segera bangun FLSU dan PGN mengalokasikan gabnya. Jadi perlu saya tegaskan audit BPK itu hanya soal delapan pembangkit ini," tandas Nur Pamudji perihal hasil audit BPK itu.

Belum Masuk Kerugian Terpisah, pengamat keuangan negara dari Universitas Indonesia (UI) Dian Puji N Simatupang menilai, temuan BPK terkait PLN belum masuk kategori kerugian negara.

Temuan BPK dinilai masih dalam kategori potensial loss.

.....dari halaman 1

Dibutuhkan audit investigatif untuk membuktikan temuan tersebut sebagai kerugian negara.

Dian Puji mengingatkan, dalam membaca hasil auditor dibutuhkan kehati-hatian dan tidak bisa langsung mengambil kesimpulan.

"Karena dalam hasil audit terdapat kategori potensial loss, total loss, risk loss, dan ekonomi loss. Temuan BPK dalam potensial loss, dan belum sampai ke total loss," jelas Dian Puji kepada INDOPOS, Senin (29/10).

Dian menjelaskan kehilangan kesempatan yang disampaikan oleh BPK belum pasti dan nyata. "Menurut saya terlalu sumir jika disebutkan itu ada kerugian negara. Ini kan baru kemungkinan. Bisa dikatakan terjadi kerugian negara jika dilihat dari tindakan PLN, apakah memberi manfaat atau tidak," kata staf pengajar Fakultas Hukum UI itu.

Dian mengingatkan, pengertian keuangan negara itu harus pasti dan nyata. "Kalau menurut hukum itu pasti dan nyata. Jadi itu masih potensi," katanya.

Untuk memastikannya, DPR RI dapat meminta kepada BPK untuk dilakukan audit investigatif. "DPR tinggal minta dan hal itu bisa dilakukan karena dalam pasal 71 ini memungkinkan," terangnya.

Dari hasil audit investigatif itu nantinya baru bisa diketahui, apakah terjadi kerugian negara atau tidak. Dapat dikatakan kerugian, jika PLN ternyata tidak memberikan manfaat dari anggaran yang sudah dikeluarkan. "Dan apakah PLN melakukan pembiaran terhadap kerugian tersebut," pungkasnya. (jprn)